

## IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU TANI DI KABUPATEN SUKOHARJO

Siti Uswatun Khasanah, Dwiningtyas Padmaningrum, Eksa Rusdiyana

Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutarmi 36 Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

Koresponden Email: [dwiningtyas\\_p@staff.uns.ac.id](mailto:dwiningtyas_p@staff.uns.ac.id)

### Abstrak

Kartu tani adalah sarana akses perbankan yang digunakan sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi sebagai solusi terkait permasalahan mahalnya harga pupuk. Pelaksanaan program kartu tani masih mengalami beberapa permasalahan sehingga menghambat pelaksanaan dan pencapaian tujuan program. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program kartu tani di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penentuan lokasi penelitian secara *purposive*. Jumlah informan ditentukan secara *purposive* sebanyak 22 orang. Data dikumpulkan dengan observasi non partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Validitas data dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian adalah sebagai berikut. Program kartu tani di Kabupaten Sukoharjo telah diimplementasikan sejak tahun 2018. Pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Sukoharjo melewati beberapa tahapan, yaitu: koordinasi, sosialisasi, pendaftaran, penyusunan RDKK, penerbitan dan pendistribusian kartu tani, penggunaan kartu tani oleh petani, dan verifikasi dan validasi kartu tani. Pihak-pihak yang terlibat dan memiliki peran tersendiri dalam pelaksanaan program kartu tani, yaitu pihak Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, penyuluh pertanian, kelompok tani, petani, kios pupuk lengkap, dan bank BRI. Evaluasi implementasi program kartu tani ditemukan adanya kekurangan, yaitu jumlah pupuk tidak sesuai dengan ajuan RDKK, keterlambatan datangnya pupuk, harga pupuk melebihi HET, petani tidak aktif mengumpulkan berkas penyusunan RDKK dan pengambilan kartu tani. Sedangkan implementasi yang sudah berjalan dengan baik, yaitu: jenis pupuk dan mutunya sesuai dengan kebutuhan; sumber daya manusia pihak dinas pertanian, penyuluh pertanian, KPL, dan pihak bank telah memberikan layanan yang baik untuk petani; dan komunikasi antar pihak sudah berjalan dengan baik.

**Kata Kunci:** Kartu Tani, Kabupaten Sukoharjo, Evaluasi Implementasi, Faktor Penghambat, Faktor Pendukung, Teori Van Meter dan Van Horn

### Abstract

*Farmer cards are a means of banking access used as a means of redeeming subsidized fertilizer as a solution to the problem of high fertilizer prices. The implementation of the farmer card program still experiences several problems that hinder the implementation and achievement of program objectives. This study aims to evaluate the implementation of the farmer card program in Sukoharjo Regency. The study used a qualitative descriptive method with a purposive determination of the research location. The number of informants was determined purposively as many as 22 people. Data were collected through non-participatory observation, in-depth interviews, and documentation. The data analysis method used the Miles and Huberman model. Data validity was carried out by triangulation of sources and techniques. The conclusions obtained from the study are as follows. The farmer card program in Sukoharjo Regency has been implemented since 2018. The implementation of the farmer card program in Sukoharjo Regency went through several stages, namely: coordination, socialization, registration, preparation of RDKK, issuance and distribution of farmer cards, use of farmer cards by farmers, and verification and validation of farmer cards. The parties involved and have their own roles in the implementation of the farmer card program, namely the Sukoharjo Regency Agriculture and Fisheries Service, agricultural extension workers, farmer groups, farmers, complete fertilizer kiosks, and BRI Bank. Evaluation of the implementation of the farmer card program found shortcomings, namely the amount of fertilizer did not match the RDKK application, late arrival of fertilizer, fertilizer prices exceeded HET, farmers were not active in collecting RDKK preparation files and collecting farmer cards. Meanwhile, the implementation that has been running well, namely: the type of fertilizer and its quality are in accordance with needs; human resources from the agricultural service, agricultural extension workers, KPL, and the bank have provided good services to farmers; and communication between parties has been running well.*

**Keywords:** *Farmer Card, Sukoharjo Regency, Implementation Evaluation, Inhibiting Factors, Supporting Factors, Van Meter and Van Horn Theory*

## PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan sektor yang berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, dalam kurun waktu 2019 - 2022, sektor pertanian menduduki peringkat kedua dengan berkontribusi sebesar 13,02% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia [1]. Pemerintah berupaya menjadikan sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian nasional dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian dan meningkatkan daya saing produk pertanian. Peningkatan produksi pertanian didukung adanya sarana produksi pertanian yang memadai salah satunya pupuk. Pupuk merupakan zat kimia alami atau sintetis yang mengandung unsur hara penting untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesuburan tanaman [2]. Hasil panen dan produktivitas tanaman pertanian akan menurun secara signifikan tanpa adanya tambahan pemupukan [3].

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan produksi pertanian melalui program pupuk bersubsidi. Hal tersebut juga dilakukan untuk memberikan jaminan akses pupuk dengan harga terjangkau untuk petani, karena harga pupuk dapat mempengaruhi hasil produksi dan pendapatan dari petani. Hasil penelitian [4] di Kabupaten Nganjuk menunjukkan harga pupuk memiliki pengaruh signifikan terhadap keuntungan petani, dimana kenaikan harga pupuk akan mengurangi keuntungan petani sehingga perlu dilakukan pengawasan lebih ketat terhadap harga pupuk subsidi dan peningkatan penggunaan pupuk organik. Sejalan dengan hal tersebut hasil penelitian [5] menyatakan mahalnya harga pupuk berpengaruh pada pendapatan petani di Desa Kelubir, karena petani hanya mampu membeli pupuk secukupnya sehingga berdampak pada kurangnya kualitas dan hasil produksi. Harga pupuk yang mahal juga meningkatkan pengeluaran petani melebihi pendapatannya. Hasil penelitian [6] juga menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara biaya pupuk dengan pendapatan di Kecamatan Mlonggo.

Penyaluran pupuk subsidi dipantau melalui mekanisme kartu tani. Menurut Kementerian Pertanian kartu tani adalah sarana akses perbankan yang digunakan sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi [7]. Tujuan dari program kartu tani adalah menyalurkan pupuk subsidi secara tepat sasaran sesuai dengan asas 6 Tepat (tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat lokasi, tepat waktu, dan tepat harga) [8]. Program kartu tani telah dilaksanakan sejak tahun 2016 di berbagai daerah di Indonesia, tetapi dalam pelaksanaannya masih mengalami permasalahan yang dapat menjadi faktor penghambat pelaksanaan dalam pencapaian tujuan program.

Berdasarkan hasil penelitian [9], kendala kartu tani di Kecamatan Parakan adalah petani mengalami kesulitan dalam penggunaan kartu tani. Hasil penelitian [10] di Desa Tanggunharjo Kabupaten Grobogan, menunjukkan kendala dalam pelaksanaan kartu tani adalah keterbatasan petani dalam mengakses layanan program, karena faktor usia dan tingkat pendidikan. Hasil penelitian [11] di Desa Sinar Tebudak, menemukan bahwa permasalahan kartu tani yaitu kartu belum tervalidasi, kurangnya sosialisasi penyuluh pertanian sehingga petani terlambat memahami penggunaan kartu tani, dan masih terdapat daerah yang belum terjangkau jaringan internet sehingga sulit untuk mengakses kartu tani. Di Desa Pangkalan Kabupaten Pangandaran, kendala penggunaan kartu tani adalah kurangnya pemahaman penyuluh pertanian mengenai administrasi program kartu tani, dan seringnya terjadi *error* pada mesin *Electronic Data Capture* (EDC) [12].

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa di beberapa daerah program kartu tani masih mengalami permasalahan dalam implementasinya. Menurut data DPR RI Tahun 2020 tentang ringkasan APBN sektor pertanian, diuraikan bahwa implementasi kartu tani baru sekitar 11,87% dari jumlah petani yang tercatat di e-RDCK Ditjen PSP Kementan [13].

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan potensi pertanian yang cukup luas dan telah mengimplementasikan program kartu tani sejak

2018. Berdasarkan wawancara pra-penelitian kepada pihak Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo, diperoleh informasi bahwa penggunaan kartu tani belum digunakan secara maksimal untuk transaksi oleh petani dan terdapat banyak kartu tani yang terblokir sehingga manfaat dari kartu tani belum dapat dirasakan petani itu sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa program kartu tani belum berhasil dari segi manfaat, karena belum dirasakan sepenuhnya oleh sasaran [14]. Berdasarkan penjelasan tersebut, telah dilakukan penelitian untuk mengevaluasi implementasi program kartu tani di Kabupaten Sukoharjo.

### MATERIAL DAN METODE

Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Juni – Juli 2024 di Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo dipilih karena merupakan kabupaten dengan tingkat produktivitas padi tertinggi di Jawa Tengah. Kerberhasilan Kabupaten Sukoharjo dalam produktivitas disebabkan oleh adanya dukungan sarana produksi pertanian berupa pupuk bersubsidi yang penebusannya dilakukan menggunakan kartu tani.

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan yang ditentukan secara *purposive*. Informan dalam penelitian ini berjumlah 22 orang meliputi pihak Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, Penyuluh Pertanian, pihak Kios Pupuk Lengkap (KPL), pihak BRI, dan petani. Selain wawancara juga dilakukan metode observasi non-partisipatif, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan.

Metode analisis data menggunakan model analisis data Miles dan Huberman. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Teori Van Meter dan Van Horn juga digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis implementasi kartu tani di Kabupaten Sukoharjo.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### *Program Kartu Tani*

Kartu tani adalah sebuah kartu yang digunakan sebagai sarana penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Kartu tani memuat informasi terkait alokasi pupuk bersubsidi yang diperoleh petani sehingga dapat digunakan untuk

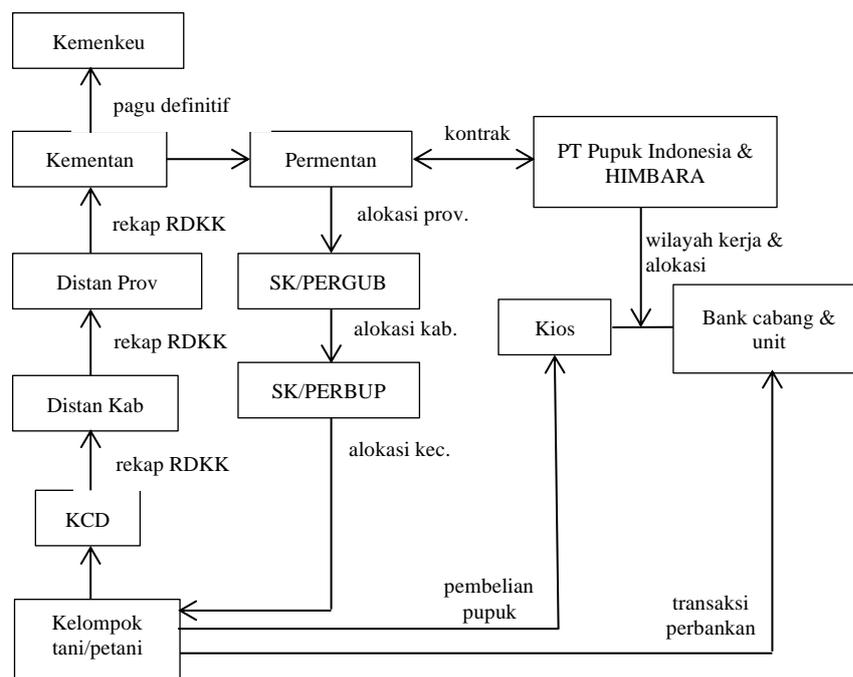
transaksi penebusan pupuk bersubsidi di kios resmi yang telah ditentukan. Pelaksanaan program kartu tani melibatkan banyak pihak mulai dari tingkat kelompok tani, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga mencapai tingkat Kementerian Pertanian (Kementan), serta melibatkan pihak Bank, dan produsen pupuk di Indonesia.

Alur pelaksanaan kartu tani seperti disajikan pada Gambar 1, dimulai dari penyusunan ajuan alokasi pupuk bersubsidi oleh kelompok tani didampingi oleh penyuluh pertanian. Menurut [7] usulan kebutuhan pupuk bersubsidi disusun dalam bentuk Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan diinput pada aplikasi e-RDKK kemudian diverifikasi dan validasi secara berjenjang dari koordinator penyuluh pertanian (korluh) kecamatan hingga sampai Kementan untuk disetujui. Kementan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menentukan alokasi pupuk bersubsidi yang dapat diberikan kepada petani di seluruh Indonesia dengan menyesuaikan anggaran negara (pagu definitif).

Penetapan jumlah alokasi pupuk bersubsidi didasarkan pada data e-RDKK yang telah disusun sebelumnya dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran negara. Jumlah alokasi setiap petani diinformasikan oleh Dinas Pertanian termasuk penyuluh pertanian kecamatan kepada petani melalui KPL sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi. Pemerintah melakukan kerja sama dengan PT Pupuk Indonesia sebagai produsen utama pupuk bersubsidi, dan Himpunan Bank Negara (HIMBARA) sebagai bank yang menerbitkan rekening kartu tani. Petani dapat melakukan pembelian pupuk bersubsidi di KPL yang telah ditentukan jika data alokasi telah muncul. Penyaluran pupuk kepada petani dilaksanakan melalui produsen kepada distributor, selanjutnya disalurkan kepada pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya hingga sampai kepada kelompok tani/petani dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian [7]. Petani dapat mendatangi bank cabang/unit yang telah ditunjuk dalam kerja sama penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tersebut apabila mengalami masalah kartu atau akan melakukan transaksi perbankan lainnya.

Proses selanjutnya dari transaksi kartu tani yang adalah proses verifikasi dan validasi (verval) kartu tani, yaitu proses monitoring dan penyetujuan transaksi pupuk yang telah dilakukan. Verval dilakukan setiap bulan oleh petugas verval tingkat kecamatan, tingkat kabupaten (tim pembina), dan tingkat pusat. Tim verval dan tim pembina berhak mendapatkan data dari pengecer, distributor, dan produsen

pupuk bersubsidi terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi. Tim verval berkewajiban melaksanakan tugas pada waktu yang sudah ditetapkan, sedangkan tim pembina berkewajiban melakukan sosialisasi dan monitoring serta pembinaan pelaksanaan verval. Kegiatan verval juga dilakukan secara berjenjang dari tingkat kecamatan hingga disetujui tingkat pusat.



Keterangan: KCD (Kantor Cabang Dinas), PERGUB (Peraturan Gubernur), PERBUP (Peraturan Bupati)

Gambar 1. Alur Perencanaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi (Diadopsi Dari [13] dengan Modifikasi Dari Lapangan)

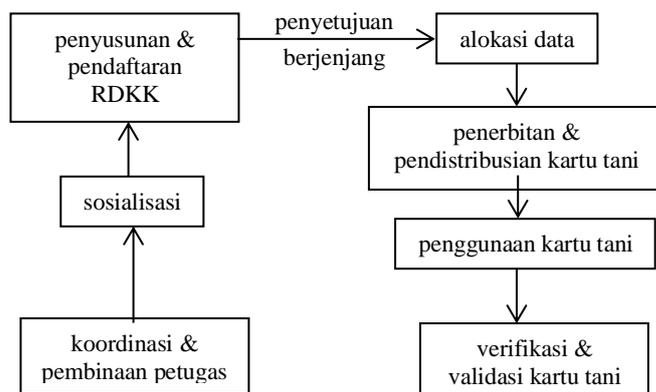
**Implementasi Program Kartu Tani di Kabupaten Sukoharjo**

Program kartu tani merupakan program dari pemerintah pusat yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing wilayah tingkat kabupaten. Program kartu tani di Kabupaten Sukoharjo telah diimplementasikan sejak tahun 2018 oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo di 12 kecamatan. Pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Sukoharjo melewati beberapa tahapan pelaksanaan seperti yang disajikan pada Gambar 2, yaitu:

1. Koordinasi, mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang

disepakati bersama untuk menjaga sinkronisasi antar pelaksana kegiatan sehingga tercipta sebuah jaringan komunikasi dan informasi yang efektif dalam pencapaian tujuan bersama [15]. Koordinasi dilakukan melalui rapat dinas atau pertemuan rutin secara terjadwal ataupun insidental membahas hal-hal sebagai berikut: persiapan penyusunan RDKK tahunan, evaluasi penggunaan kartu tani oleh petani tahun sebelumnya, rencana pengajuan alokasi untuk tahun selanjutnya, proses Verval, dan penyampaian informasi-informasi terbaru. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan koordinasi, yaitu Dinas Pertanian,

- koordinator dan para penyuluh pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), petani, para KPL, dan bank. Koordinasi dalam bentuk rapat dinas juga digunakan sebagai sarana pembinaan kepada para penyuluh pertanian admin kartu tani di kecamatan. Pihak Dinas Pertanian berkewajiban untuk melakukan pembinaan kepada petugas di kecamatan. Koordinasi tidak hanya dilakukan secara tatap muka tetapi juga dilakukan secara *online* melalui media WhatsApp [7];
2. Sosialisasi dilakukan pada awal kemunculan program untuk memperkenalkan program kepada petani. Sosialisasi juga dilakukan dalam pertemuan rutin petani setiap 3-4 bulan sekali saat musim panen/tanam. Pertemuan tersebut bukan forum khusus untuk membahas kartu tani tetapi penyuluh pertanian menyisipkan topik terkait kartu tani seperti membahas kuota pupuk, evaluasi pemanfaatan pupuk, atau penyampaian informasi terbaru terkait kartu tani/subsidi pupuk;
  3. Pendaftaran dan penyusunan RDKK, dilakukan oleh kelompok tani didampingi penyuluh pertanian. RDKK merupakan perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi berdasarkan rekomendasi penggunaan pupuk yang lebih tinggi atau lebih sedikit. Singkatnya, RDKK merupakan penggunaan pupuk dalam satu musim yang dapat mempengaruhi produksi pertanian [16]. Bagi petani yang belum tercantum namanya dalam RDKK maka perlu mendaftar dengan mengumpulkan berkas berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan surat pajak PBB. Bagi petani yang sudah tercantum namanya dapat melakukan *update* data apabila terdapat data yang berubah dari data sebelumnya. Setelah berkas pendaftaran kartu tani dikumpulkan dan RDKK selesai disusun, penyuluh akan memasukkan data-data petani tersebut ke sistem e-RDKK kemudian diproses secara berjenjang hingga menjadi data alokasi pupuk yang diperoleh petani;
  4. Penerbitan dan pendistribusian kartu tani, dilakukan oleh Bank BRI selaku bank penerbit kartu tani di Provinsi Jawa Tengah. Sistem pendistribusian kartu tani dilakukan dengan petani sendiri mendatangi bank BRI untuk mengambil kartu tani;
  5. Penggunaan kartu tani oleh petani, sebagian besar petani menggunakan kartu tani hanya untuk alat penebusan pupuk bersubsidi. Padahal kartu tani dapat berfungsi untuk transaksi perbankan lainnya seperti menabung dan transfer. Masih banyak juga petani yang membeli pupuk bersubsidi dengan uang tunai yang seharusnya pembayaran dilakukan dengan saldo pada kartu tani. Oleh karena itu, pihak KPL perlu men-transfer dana ke rekening kartu tani pada mesin EDC sehingga petani tidak perlu membayar pupuk secara tunai [7]. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian [17] bahwa mayoritas petani menggunakan kartu tani hanya untuk transaksi penebusan pupuk bersubsidi (46,7%), transaksi menabung dan transfer belum terlalu dimanfaatkan. Pemanfaatan kartu tani juga tergolong rendah (11,7%) meskipun untuk menebus pupuk, karena petani melakukan dengan pembayaran tunai. Terdapat juga beberapa KPL yang masih menggunakan sistem kartu tani ditinggal di KPL. Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Dairi di Provinsi Sumatera Utara, dimana petani meninggalkan kartu tani dan memberi kepercayaan kepada KPL untuk menggesek kartu di EDC karena petani merasa tidak memiliki waktu untuk melakukan transaksi langsung ke KPL sehingga setelah transaksi pupuk bisa langsung diantar ke lokasi petani [18];
  6. Verval kartu tani, dilakukan untuk validasi transaksi pembelian pupuk petani dalam satu bulan pada *website* e-verval oleh penyuluh pertanian dengan mengecek transaksi yang dilakukan sudah sesuai atau belum. Kegiatan verval bertujuan untuk memastikan pembayaran dari Kementerian Pertanian kepada PT Pupuk Indonesia sesuai dengan realisasi penyaluran pupuk di lapangan. Verifikasi merupakan kegiatan untuk memeriksa kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan dokumentasi pupuk bersubsidi, sedangkan validasi merupakan kegiatan pengesahan hasil dari verifikasi sebelumnya [19]. Proses verval dilakukan secara berjenjang dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat;



Gambar 2. Tahap Pelaksanaan Program Kartu Tani di Kabupaten Sukoharjo

***Pihak-Pihak Yang Terlibat Pada Program Kartu Tani Di Kabupaten Sukoharjo***

Berdasarkan tahap pelaksanaan program kartu tani, terdapat pihak-pihak yang terlibat dan memiliki peran tersendiri dalam pelaksanaan program kartu tani. Semua pihak yang terlibat memiliki peran yang penting untuk membuat pelaksanaan program kartu tani menjadi efektif. Berikut ini pihak yang terlibat dan peranannya dalam program kartu tani di Kabupaten Sukoharjo.

1. Dinas Pertanian, berperan dalam melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap penyuluh pertanian admin kartu tani di kecamatan. Pembinaan dilakukan saat forum rapat, jadi tidak ada forum pembinaan secara khusus. Dinas Pertanian berperan juga menyusun petunjuk teknis penjabaran dari petunjuk pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi setempat, tetapi tidak ada petunjuk khusus untuk daerah, jadi hanya berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 34.11/KPTS/RC.210/B/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi. Selanjutnya, berperan dalam menyusun konsep alokasi dan merekap RDKK, serta melakukan verifikasi dan validasi kartu tani tingkat kabupaten;
2. Penyuluh Pertanian di kecamatan, berperan dalam melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada petani, mendampingi penyusunan RDKK di kelompok tani, mengumpulkan berkas pendaftaran kartu tani, input data ke system, melakukan verval tingkat kecamatan (bagi admin kartu tani), dan membantu

pendistribusian kartu tani (apabila diperlukan);

3. Ketua kelompok tani, berperan untuk membantu pengumpulan berkas untuk penyusunan RDKK dan membantu mengkoordinir kelompok tani dalam pertemuan rutin;
4. Petani berkewajiban mengumpulkan berkas untuk penyusunan RDKK, mengambil kartu tani, serta mengambil jatah pupuk yang telah didapat dengan menggunakan kartu tani;
5. KPL berperan dalam menyediakan stok pupuk di kios, melayani transaksi penebusan pupuk bersubsidi, dan menjual pupuk subsidi sesuai dengan HET. Terdapat kekurangan pihak KPL dalam melaksanakan perannya dalam program kartu tani karena masih ada beberapa KPL yang kehabisan stok pupuk terutama pada saat puncak penggunaan pupuk. Terdapat juga beberapa KPL yang melakukan pelayanan transaksi penebusan pupuk dengan kartu tani tetapi kartu tani ditinggal di kios sehingga kartu tidak dibawa petani sendiri. Terkait harga pupuk sesuai dengan HET, terdapat KPL yang menerapkan harga melebihi HET karena ada biaya tambahan untuk transfer, administrasi, dan lain-lain yang telah disepakati. Kenaikan harga juga terjadi pada penelitian terdahulu [20] bahwa hal tersebut merupakan kesepakatan diluar aturan untuk biaya tambahan seperti transportasi pengantaran pupuk;
6. Bank BRI, berperan dalam pencetakan kartu tani dan pembuatan nomor rekening, pendistribusian kartu tani, dan melayani serta memberikan solusi dari segala keluhan atau

permasalahan yang dialami oleh petani terkait kartu tani.

### **Evaluasi Implementasi Program Kartu Tani di Kabupaten Sukoharjo**

Implementasi kartu tani di Kabupaten Sukoharjo dapat dievaluasi dari beberapa aspek, yaitu aspek standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi organisasi antar pelaksana, dan sikap (disposisi pelaksana) menurut Van Meter dan Van Horn [21]. Implementasi dari teori Van Meter dan Van Horn termasuk ke dalam implementasi secara *top-down* yang berarti kebijakan berasal dari pemerintah pusat untuk rakyat dan pelaksanaannya diserahkan kepada daerah masing-masing [22].

Evaluasi Implementasi program kartu tani di Kabupaten Sukoharjo pada aspek standar dan tujuan kegiatan ditemukan masih terdapat kekurangan, yaitu tidak memenuhi tujuan kartu tani berdasarkan asas 6 Tepat (tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat tempat, tepat mutu, dan tepat harga). Pada aspek tepat jumlah, ditemukan bahwa pupuk yang diperoleh beberapa petani masih tidak sesuai dengan alokasi seperti yang diajukan pada RDKK. Semua petani di Kabupaten Sukoharjo sudah mendapatkan pupuk bersubsidi dan dapat melakukan penebusan pupuk sesuai.

Evaluasi pada aspek tepat jenis menunjukkan petani telah menerima jenis pupuk yang sesuai dengan jenis yang diperlukan dan mutu pupuk yang diperoleh memiliki kualitas yang baik. Evaluasi pada aspek tepat waktu dan tepat lokasi, ditemukan bahwa masih terdapat KPL yang mengalami keterlambatan datangnya pupuk terutama pada saat puncak penggunaan pupuk. Pada evaluasi aspek tepat harga ditemukan, bahwa harga pupuk di beberapa KPL masih dianggap murah dan dapat dijangkau oleh petani, tetapi pada beberapa KPL tempat lainnya terdapat peningkatan harga yang melebihi HET yang telah ditentukan.

Evaluasi program kartu tani pada aspek sumber daya dapat dievaluasi pada kemampuan sumber daya manusia yang tersedia, sumber daya finansial, dan sumber daya sarana prasarana. Sumber daya manusia penyuluh pertanian, pegawai KPL, dan pihak bank yang terlibat pada program kartu tani telah memberikan layanan yang baik untuk petani. Pada aspek sumber daya petani ditemukan bahwa terdapat kekurangan, yaitu beberapa

petani memiliki motivasi yang rendah terutama untuk pengumpulan berkas penyusunan RDKK, dan pengambilan kartu tani di bank BRI. Sementara pada aspek sumber daya finansial dan sarana prasarana sudah tersedia dengan baik.

Evaluasi program kartu tani pada aspek komunikasi telah ditemukan, bahwa sudah terjalin komunikasi antar pihak dengan baik melalui pertemuan rutin atau insidental serta komunikasi secara *online*. Komunikasi yang perlu terus ditingkatkan adalah komunikasi pihak KPL dengan distributor terkait stok pupuk di kios. Sementara evaluasi pada aspek disposisi ditemukan bahwa semua pihak menerima kebijakan dengan baik.

### **Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Program Kartu Tani di Kabupaten Sukoharjo**

Faktor-faktor penghambat merupakan segala sesuatu yang dapat menghambat atau menghalangi pelaksanaan program. Sebaliknya, faktor-faktor pendukung adalah segala sesuatu yang mendukung pelaksanaan implementasi program.

#### *Faktor-faktor penghambat dari internal petani*

Petani banyak yang menunda pengumpulan berkas pendaftaran RDKK, meskipun berkas yang dibutuhkan dianggap mudah. Hal tersebut juga terjadi pada hasil penelitian [23] bahwa penyuluh pertanian di Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani sulit mengumpulkan data para petani untuk pendaftaran petani ke RDKK karena petani merasa keberatan dan enggan untuk mengumpulkan berkas pendaftaran sehingga data untuk RDKK tidak terkumpul dan banyak petani yang belum menerima kartu tani.

Petani banyak yang menunda mengambil kartu tani ke bank BRI, karena petani beranggapan bahwa pelayanan BRI tidak terlalu memuaskan. Alasannya untuk mengambil kartu tani, petani harus menantri cukup lama. Kendala tersebut juga ditemukan pada hasil penelitian [24], bahwa petani di Kecamatan Manonjaya petani tidak mau mengambil kartu tani dengan mendatangi bank sendiri karena alasan malas mengantri atau letak bank jauh dari tempat tinggal. Penyuluh Pertanian di beberapa wilayah mengatasi kendala ini dengan berinisiatif datang ke BRI untuk mengambil kartu tani, dan kemudian mendistribusikan kepada para petani secara langsung.

Petani banyak yang menunda kegiatan pembaruan data RDKK. Biasanya petani yang sudah terdaftar di RDKK jarang yang melakukan pembaharuan datanya. Petani biasanya memberikan data yang sama seperti data pada tahun sebelumnya sehingga data tidak ter-*update* dan menjadi tidak valid. Hasil penelitian [25] menunjukkan bahwa penyusunan RDKK pada prakteknya di lapangan hanya melakukan *copy paste* dan meng-*upload* kembali data pada tahun sebelumnya karena beberapa alasan, yaitu data yang didapat hanya berupa data mentah dari petani, waktu yang terbatas, dan jumlah penyuluh yang terbatas. Pendataan setiap tahun harus selalu dilakukan ketika masa penyusunan RDKK baik untuk petani yang datanya berubah atau tidak berubah supaya data pada kartu tani yang muncul juga sesuai dengan data terbaru.

#### *Faktor-Faktor Penghambat Dari Eksternal*

Kartu tani yang digunakan petani sering mengalami *error*. Kartu tani saat digesek di mesin *Electronic Data Capture* (EDC) tidak dapat digunakan untuk transaksi. Dimana hal yang terjadi adalah data alokasi tidak dapat terbaca karena kartu tidak aktif dan nomor kartu tani tidak terdaftar pada mesin EDC KPL. Apabila kartu tani tidak aktif, maka petani perlu datang ke bank BRI untuk mengaktifkannya kembali. Tetapi apabila nomor kartu tidak terdaftar maka perlu dilakukan pengecekan data petani pada Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI). Hasil penelitian [26] juga menunjukkan bahwa banyak kartu tani tidak aktif, tidak bisa terbaca pada mesin EDC, serta gangguan sinyal sehingga penebusan pupuk dilakukan secara manual. Hasil penelitian [27] menyatakan, bahwa kartu tani tidak bisa digesekkan ke mesin EDC. Kendala lain, kartu tani tidak muncul karena gagal aktivasi akibat adanya salah input data oleh penyuluh pertanian. Apabila terjadi kendala tersebut petani harus segera melapor ke penyuluh pertanian supaya dapat didaftarkan untuk masuk ke e-alokasi tahun selanjutnya;

Pada saat penggunaan pupuk diperlukan petani, ketersediaan pupuk di KPL tidak ada karena kedatangannya sering terlambat. Petani harus menunggu hingga satu minggu sampai pupuk kembali tersedia di KPL. Sehingga petani mengantisipasi dengan membeli pupuk non-subsidi. Kasus serupa terjadi di Kecamatan Pelaihari dimana sebanyak 67,57% responden

menyatakan bahwa pupuk subsidi tidak tersedia saat awal musim tanam karena sering datang terlambat dan tiba ketika musim tanam sudah selesai sehingga petani tidak bisa melakukan pemupukan selama awal tanam [28]. Hal tersebut menunjukkan distribusi pupuk sangat tidak efektif dilihat dari ketepatan waktu. Pihak KPL dalam hal ini perlu mengecek dan menjaga stok pupuk agar selalu tersedia dengan bekerja sama menjalin komunikasi dengan distributor.

Adanya pembatasan jumlah alokasi pupuk oleh pemerintah, yaitu hanya sekitar 50% dari yang diajukan. Jumlah tersebut biasanya hanya mencukupi petani sampai musim tanam kedua, sedangkan petani dalam setahun melakukan tiga kali tanam. Hal tersebut terjadi karena subsidi pupuk dari pemerintah disesuaikan dengan anggaran dan kemampuan negara dalam memberikan subsidi. Kendala tersebut juga terjadi di Kecamatan Tinggimoncing, dimana jumlah pupuk dari pemerintah sangat sedikit dan tidak sesuai dengan pengajuan RDKK [29]. Hasil penelitian [30] di Kabupaten Klaten ditemukan, bahwa terbatasnya anggaran pemerintah dalam program pupuk bersubsidi menyebabkan kelangkaan pupuk bersubsidi di kalangan petani. Untuk mengatasi kekurangan pupuk, petani biasanya mengatasinya dengan membeli pupuk non subsidi.

#### *Faktor-Faktor Pendukung*

Adanya inisiatif penyuluh pertanian, mengidentifikasi masalah dan langsung memberi solusi. Penyuluh pertanian sering melakukan kunjungan secara spontan kepada petani, sehingga ada komunikasi yang intens dan penyuluh pertanian dapat melihat kondisi dan mendengar langsung permasalahan yang sedang dialami petani. Penyuluh juga bersikap cepat tanggap dalam menanggapi permasalahan. Di lapangan ditemukan bahwa petani cenderung langsung mendatangi penyuluh pertanian apabila mengalami permasalahan dan penyuluh pertanian selalu memberikan solusi serta saran yang sesuai dengan permasalahan;

Adanya inisiatif penyuluh pertanian untuk menyampaikan informasi yang terbaru kepada petaninya. Penyuluh pertanian aktif menginformasikan perkembangan dari program kartu tani kepada kelompok tani di wilayahnya yang disampaikan melalui grup WhatsApp;

Adanya inisiatif penyuluh pertanian untuk belajar otodidak untuk proses verbal berkas dan

data tentang program kartu tani. Para penyuluh pertanian yang terlibat dalam program kartu tani, aktif untuk terus berkembang dan belajar untuk dirinya sendiri. Penyuluh pertanian bersedia belajar otodidak terutama terkait dalam penggunaan sistem seperti e-alokasi dan e-verval karena tidak ada pembinaan khusus. Penyuluh pertanian juga sering bertanya kepada penyuluh di wilayah lain yang lebih paham atau lebih berpengalaman pada penggunaan sistem e-alokasi dan e-verval sehingga dalam hal ini antar penyuluh juga saling bertukar informasi dan ilmu yang dimiliki.

Adanya inisiatif penyuluh pertanian untuk melakukan komunikasi dan koordinasi antar pihak. Kegiatan dilakukan melalui rapat, pertemuan rutin, maupun koordinasi melalui media *WhatsApp*. Secara keseluruhan kegiatan komunikasi dan koordinasi sudah berjalan dengan baik dan tidak menyebabkan hambatan yang besar.

### KESIMPULAN

Program kartu tani di Kabupaten Sukoharjo telah diimplementasikan sejak tahun 2018. Pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Sukoharjo melewati beberapa tahapan, yaitu: koordinasi, sosialisasi, pendaftaran, penyusunan RDKK, penerbitan dan pendistribusian kartu tani, penggunaan kartu tani oleh petani, dan verifikasi dan validasi kartu tani.

Berdasarkan tahap pelaksanaan program kartu tani, terdapat pihak-pihak yang terlibat dan memiliki peran tersendiri dalam pelaksanaan program kartu tani, yaitu pihak dinas pertanian dan perikanan Kabupaten Sukoharjo, Penyuluh Pertanian, Kelompok Tani, Petani, Kios Pupuk Lengkap, dan Bank BRI.

Evaluasi implementasi program kartu tani di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, ditemukan adanya kekurangan, yaitu jumlah pupuk tidak sesuai dengan ajuan RDKK, keterlambatan datangnya pupuk terutama pada saat puncak penggunaan pupuk, harga pupuk di beberapa KPL melebihi HET, petani tidak aktif untuk pengumpulan berkas penyusunan RDKK dan pengambilan kartu tani. Selain itu implementasi yang sudah berjalan dengan baik, yaitu: jenis pupuk dan mutunya sesuai dengan kebutuhan; sumber daya manusia pihak dinas pertanian, penyuluh pertanian, KPL, dan pihak bank telah

memberikan layanan yang baik untuk petani; dan komunikasi antar pihak sudah berjalan dengan baik.

Faktor-faktor internal penghambat implementasi program kartu tani di Kabupaten Sukoharjo, adalah petani yang sering menunda pengumpulan berkas pendaftaran, pengambilan kartu tani, dan pembaharuan data RDKK. Sementara faktor-faktor eksternal, adalah kartu sering mengalami eror, pupuk tidak tersedia pada saat dibutuhkan, dan adanya pembatasan jumlah alokasi pupuk dari pemerintah. Sedangkan faktor-faktor pendukung, adalah: adanya inisiatif penyuluh pertanian untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi, menginformasikan hal yang terbaru tentang kartu tani, belajar otodidak untuk proses verval data, dan melakukan komunikasi dan koordinasi antar pihak.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kementerian Pertanian. 2023. Analisis PDB Sektor Pertanian 2023. Diakses 16 Juli 2024 dari: [https://satudata.pertanian.go.id/assets/doc/s/publikasi/Analisis\\_PDB\\_Sektor\\_Pertanian\\_2023.pdf](https://satudata.pertanian.go.id/assets/doc/s/publikasi/Analisis_PDB_Sektor_Pertanian_2023.pdf).
- [2] Randive, K, Raut, T, Jawadand, S. 2021. An overview of the global fertilizer trends and India's position in 2020. *Mineral Economics* Vol. **34** (3): 371-384.
- [3] Suntari, R, Nugroho, GA, Fitria, AD, et al. 2021. *Teknologi Pupuk dan Pemupukan Ramah Lingkungan*. (Malang: UB Press) hal 3.
- [4] Hasan, F. 2019. Efisiensi Keuntungan Usahatani Bawang Merah Di Kabupaten Nganjuk: pendekatan stokastik frontier. *J. Social Economic of Agriculture*, Vol. **8** (1): 94-103.
- [5] Rusyanti, N, Seli, S, M. 2023. Pengaruh Harga Pupuk, Pestisida dan Harga Jual Terhadap Pendapatan Petani Jagung di Desa Kelubir, Kabupaten Bulungan. *J. Ilmu Pertanian Kaltara* Vol. **1** (1): 28-33.
- [6] Agfrianti, S, I, Budiraharjo, K, Handayani, M. 2023. Analisis Pendapatan Usaha Tani Padi dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya. *J. Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK* Vol. **19** (1):17-30.

- [7] Kementerian Pertanian. 2023. Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi TA 2024. Diakses pada 5 Januari 2024 dari: <https://psp.pertanian.go.id/storage/1728/34.11-Petunjuk-Teknis-Pengelolaan-Pupuk-Bersubsidi-TA-2024.pdf>.
- [8] Ashari, ML, Hariani, D. 2019. Analisis Efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. *J. of Public Policy and Management Review* Vol. **8** (2): 574-594.
- [9] Gusti, IM, Gayatri, S, Prasetyo, AS. 2021. Pengaruh Umur, Tingkat Pendidikan dan Lama Bertani terhadap Pengetahuan Petani tentang Manfaat dan Cara Penggunaan Kartu Tani di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. *J. Litbang Provinsi Jawa Tengah* Vol. **19** (2): 209-221.
- [10] Susilowati, DF, Purwandari, I, Trimerani, R. 2023. Efektivitas Program Kartu Tani dalam Upaya Pemberdayaan Petani di Desa Tanggunharjo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. *J. Mahasiswa Instiper* Vol. **1** (1): 283-289.
- [11] Oriezha, E. 2024. Efektivitas Implementasi Kartu Tani terhadap Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Sinar Tebudak. *El-Mal: J. Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* Vol. **5** (2): 877-885.
- [12] Nugraha, Y, Dedi, A, Munir, SM. 2022. Implementasi Program Kartu Tani di Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. *J. Inskripsi*, Vol. **2** (2): 2900-2912.
- [13] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Analisis Ringkas Cepat Public. Diakses pada 10 Mei 2024 dari: <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-39.pdf>.
- [14] Karmanis, K. 2020. *Buku Pedoman Belajar Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. CV Pilar Nusantara. Banten. hal 32.
- [15] Castañer, X, Oliveira, N. 2020. Collaboration, coordination, and cooperation among organizations: Establishing the distinctive meanings of these terms through a systematic literature review. *J. of management* Vol. **46** (6): 1-37.
- [16] Sugiono, S, Gufroniah, SF, 2023. Pendistribusian Pupuk Bersubsidi dengan Acuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Perspektif Etika Bisnis. *Al-Kharaj: J. Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* Vol. **5** (1): 371-385.
- [17] Nafi'ah, I, Virianita, R. 2023. Persepsi dan Motivasi Petani dalam Pemanfaatan Kartu Tani (Kasus: Desa Pohijo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati). *J. Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, Vol. **7** (2): 217-233.
- [18] Bintang, WA, Thahir, B. 2024. *Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani Dalam Memenuhi Keterjangkauan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi: IPDN.
- [19] Halim, IA, Adab, MP. 2023. *Kartu Tani dan Pupuk Bersubsidi Kajian Pemanfaatan Pada Kelompok Tani di Kabupaten Maros*. Adab. Indramayu. hal. 81.
- [20] Ramlayana, R, Ansari, MI, Sudarmi, S. 2020. Efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani padi di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. *J. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik* Vol. **1** (3): 949-962.
- [21] Nugroho, R. 2021. *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Elex Media Komputindo, Jakarta. hal. 27 – 29.
- [22] Hernimawati. 2018. *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame*. Jakad Publishing, Surabaya. hal. 42.
- [23] Adiraputra, P, Supyandi, D. 2021. Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Di Desa Sukaasih Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. *J. Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Januari* Vol. **7** (1): 594-606.
- [24] Noormansyah, Z, Nuryaman, H, Mutiasari, NR. 2023. Efektivitas Penggunaan KARTU Tani Pada Petani Mendong. *J. Agribusiness and Agricultural Economics Journal* Vol. **6** (2): 307-324.
- [25] Mamo, YO, Sofilda, E, Huda, N. 2024. Peran Komisi IV DPR RI Dalam Mengawasi Kebijakan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. *Media Bina Ilmiah* Vol. **18** (11): 2803-2820.

- [26] Gunawan, E, Pasaribu, S. 2020. Persepsi Petani dan Permasalahan Program Kartu Tani Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi. *J. Ekonomi dan Pembangunan* Vol. **28** (2): 131-144.
- [27] Anisa, F, Adnan, MF. 2021. Evaluasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman. *J. Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. **5** (4): 1137-1150.
- [28] Saputra, AD, Radiah, E, Mariani, M. 2022. Efektivitas Distribusi Pupuk Subsidi pada Tingkat Petani Padi Sawah di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. *Frontier Agribisnis*, Vol. **6** (4): 216-223.
- [29] Arfin, D, Usman, J, Sudarmi, S. 2022. Efektivitas Program Kartu Tani pada Tata Kelola Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, Vol **3** (6):1757-1768.
- [30] Sejati, DD, Harisudin, M, Sutrisno, J, *et al.* 2023. Analisis Mitigasi Risiko Pada Distribusi Pupuk Bersubsidi PT Pusri Dengan Metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) di Kabupaten Klaten. *Agrista* Vol. **11** (1): 70-81.